



JURNAL BASICEDU

Volume 7 Nomor 5 Tahun 2023 Halaman 2928 - 2941

Research & Learning in Elementary Education

<https://jbasic.org/index.php/basicedu>



Kendala Dan Kebutuhan Guru Sekolah Dasar dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Lampung

Heni Herlina¹, Ossy Firstanti Wardany^{2✉}, Yulvia Sani³, Revita Zalsyabila Maharani⁴

Pendidikan Luar Biasa, Universitas Muhammadiyah Lampung, Indonesia^{1,2,3,4}

E-mail: heniherlina1306@gmail.com¹, ossyfirstan@gmail.com², yulviasani10@upi.edu³,
revitazalsyabila@gmail.com⁴

Abstrak

Transisi dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka bagi PDBK (Peserta Didik Berkebutuhan Khusus) diasumsikan menimbulkan tantangan baru bagi guru dalam mengimplementasikannya. Penelitian bertujuan untuk menggali kendala sekaligus merumuskan kebutuhan guru SD dalam implementasi Kurikulum Merdeka bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) di Provinsi Lampung. Penelitian menggunakan metode survei dengan bantuan Google Form, dan terdapat 32 guru yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka dan memiliki PDBK di kelas. Hasil penelitian menemukan bahwa 56% guru mengaku belum pernah mempelajari mengenai Kurikulum Merdeka bagi PDBK. Guru SD di Lampung diketahui mengalami kesulitan dalam merancang pembelajaran, melakukan adaptasi kurikulum, serta merancang dan melakukan evaluasi pembelajaran. Berdasarkan jawaban guru diketahui guru membutuhkan orang tua yang lebih aktif dalam berkolaborasi (94%), dukungan sarana dan prasarana yang aksesibel (84%), dukungan sekolah (84%), aplikasi dalam mengidentifikasi PDBK saat PPDB (75%) serta di rentang 63-66% guru membutuhkan panduan asesmen, serta berbagai pelatihan dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran dengan desain universal, adaptasi kurikulum, hingga memahami serta menangani PDBK di kelas. Temuan permasalahan dan rumusan kebutuhan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah, akademisi, maupun organisasi terkait dalam membantu guru mengimplementasikan Kurikulum Merdeka bagi PDBK di SD regular.

Kata Kunci: implementasi Kurikulum Merdeka, peserta didik berkebutuhan khusus, sekolah dasar, kebutuhan, guru

Abstract

The transition from the 2013 Curriculum to the Merdeka Curriculum for PDBK (Students with Special Needs) is assumed to pose new challenges for teachers in implementing it. The research aims to explore problems and formulate the needs of elementary school teachers in implementing the Merdeka Curriculum for Students with Special Needs in Lampung Province. The research used a survey method with Google Form, and there were 32 teachers who had implemented the Independent Curriculum and had students with special needs in class. The research results found that 56% of teachers admitted that they had never studied the Merdeka Curriculum for students with special needs. Elementary school teachers in Lampung are known to experience difficulties in designing learning, adapting the curriculum, as well as designing and evaluating learning. Based on teachers' answers, it is known that teachers need parents who are more active in collaborating (94%), support for accessible facilities and infrastructure (84%), school support (84%), applications in identifying students with special needs when accepting new students (75%) and in the range of 63-66% of teachers need assessment guidance, as well as various training in designing differentiated learning, learning with universal designs, adapting the curriculum, and understanding and handling students with special needs in the classroom. It is hoped that the problem findings and needs formulation can provide input to the government, academics and related organizations in helping teachers implement the Merdeka Curriculum for students with special needs in regular elementary schools.

Keywords: implementation of the Merdeka Curriculum, students with special needs, elementary schools, needs, teachers

Copyright (c) 2023 Heni Herlina, Ossy Firstanti Wardany, Yulvia Sani, Revita Zalsyabila Maharani

✉Corresponding author :

Email : ossyfirstan@gmail.com

DOI : <https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i5.6086>

ISSN 2580-3735 (Media Cetak)

ISSN 2580-1147 (Media Online)

PENDAHULUAN

Perubahan kurikulum di Indonesia merupakan sesuatu yang kerap terjadi. Indonesia telah melakukan 11 kali pergantian kurikulum sejak kurikulum 1947 (Ananda & Hudaidah, 2021) hingga terkini, Kurikulum Merdeka. Saat ini, tengah terjadinya peralihan dari Kurikulum 2013 menjadi Kurikulum merdeka, yang juga merupakan dampak dari pandemi Covid-19 (Muzdalifa, 2022). Peralihan kurikulum ini bertujuan mengejar ketertinggalan pembelajaran sekaligus memperbaiki pendidikan setelah pandemi Covid-19 tersebut. Kurikulum Merdeka di sekolah reguler memiliki keunikan dan kebaruan, terutama dalam hal akomodasi kurikulum bagi peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) di sekolah reguler atau sekolah penyelenggara pendidikan inklusi.

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang menyelenggarakan pendidikan inklusi di sekolah, termasuk pada tingkat SD. Kendati tidak secara khusus mendeklarasikan sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusi, tetapi sebagian besar SD di Lampung menerima PDBK, terutama lamban belajar dan kesulitan belajar spesifik di sekolah. Misalnya, peneliti melakukan observasi awal di SDN 3 Sukaraja, Lampung Selatan yang memiliki peserta didik dengan hambatan pendengaran, lamban belajar, hambatan intelektual, dan kesulitan belajar. Salah satu guru menyebutkan bahwa sekolah mereka memang tidak mendeklarasikan secara khusus sebagai sekolah inklusi, tetapi tetap menerima anak yang tinggal di dekat sekolah dengan berbagai keragamannya. Sekolah menyadari bahwa jarak antara SD tersebut ke SLB terdekat sekitar 16-18 kilometer, sehingga anak yang berada di dekat sekolah, berhak untuk belajar di sekolah terdekat. Sehingga sekolah berusaha memberikan pembelajaran yang sesuai dengan potensi, masalah dan kebutuhan peserta didik.

Kurikulum Merdeka memiliki sejumlah perbedaan dengan Kurikulum 2013 seperti perubahan dari RPP ke Modul Ajar, dalam ada adanya Capaian Pembelajaran, munculnya pembelajaran berdiferensiasi, maupun peserta didik dapat digolongkan ke dalam fase berdasarkan usia dan usia mentalnya (Angga, Suryana, Nurwahidah, Hernawan, & Prihantini, 2022). Adanya perubahan Kurikulum Merdeka diprediksi memunculkan tantangan maupun kendala bagi sebagian besar guru (Sumanti, Firman, & Ahmad, 2022), termasuk guru SD. Penelitian terdahulu menemukan bahwa keberadaan PDBK di SD memunculkan sejumlah kendala bagi guru (Agustin, 2019; Romadhon & Supena, 2021). Sehingga perubahan kurikulum, tentu menambah tantangan guru dalam melaksanakan kegiatan mengajar PDBK di kelas reguler.

Kurikulum Merdeka memiliki kelebihan seperti lebih fleksibel, menekankan pada pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodasi keberagaman peserta didik. Namun, pada pelaksanaannya, tentunya membutuhkan kesiapan guru, termasuk dalam hal adaptasi dan penyesuaian. Ketidaksiapan guru dapat menimbulkan permasalahan saat pelaksanaan (Wantiana & Mellisa, 2023). Karenanya guru perlu mempelajari dan menyesuaikan diri kembali dalam hal perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan kebutuhan administrasi sebagai dampak perubahan kurikulum (Haslina et al., 2017; Hurit & Harmawati, 2019; Lestari, 2023; Rouf & Lufita, 2013). Guru perlu adaptif, fleksibel, mampu menguasai teknologi, berkolaborasi, serta memiliki mental yang sehat agar dapat mengimplementasikan Kurikulum Merdeka (Ihsan, 2022; Nurzen, 2022; Widiastuti, Sulistiani, & Kurniawan, 2017).

Guru memiliki peran penting dalam pelaksanaan pendidikan, tetapi guru tentu tidak bisa dibiarkan sendiri menanggung segala permasalahan yang dialami. Kendala yang dihadapi oleh guru perlu diperhatikan berbagai pihak seperti sekolah, orang tua, pemerintah, dan komunitas sekitar sekolah. Hal ini karena dukungan pemerintah, sekolah, dan kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat sangat penting dalam menguatkan peran guru di sekolah. Misalnya saja, ketersediaan buku guru dan buku siswa di sekolah yang kerap menjadi satu kendala dalam implementasi Kurikulum Merdeka (Angga et al., 2022). Kepala sekolah

juga memiliki peran dalam membimbing dan membantu guru dalam mengatasi berbagai kendala yang ditemui (Isa, Asrori, & Muharini, 2022).

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, penting untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami guru dalam implementasi Kurikulum Merdeka bagi PDBK di SD di Lampung. Hal ini karena kesiapan guru menjadi poin utama dalam perubahan kurikulum (Jamjema, Tomo, Erlina, & Hartoyo, 2022), baik dalam memahami Kurikulum Merdeka, sampai dengan memiliki keterampilan mengimplementasikan kurikulum tersebut dari asesmen (Shadri et al., 2023), perencanaan hingga evaluasi pembelajaran. Lebih lagi, perubahan kurikulum kerap menyebabkan kendala seperti dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pembelajaran ketika menggunakan kurikulum 2013 (Haslina, Yusrizal, & Usman, 2017; Hurit & Harmawati, 2019; Lestari, 2023; Rouf & Lufita, 2013).

Penelitian ini dirasa penting untuk dilakukan untuk memberikan gambaran terkait pengalaman dan pemahaman guru SD mengenai Kurikulum Merdeka bagi PDBK, bagaimana implementasi Kurikulum Merdeka bagi PDBK di SD, apa saja kendala atau permasalahan yang dialami, serta apa yang dibutuhkan guru untuk dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka bagi PDBK di Sekolah Dasar. Sehingga, hasil yang didapat diharapkan dapat menjadi masukan dan referensi bagi masukan kepada pemerintah, akademisi, maupun organisasi terkait dalam membantu guru mengimplementasikan Kurikulum Merdeka bagi PDBK di SD reguler maupun penyelenggara pendidikan inklusi.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian menggunakan pendekatan survei terhadap guru Sekolah Dasar (SD) di Lampung. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebar melalui Google Form. Pemilihan metode survei menggunakan Google Form ini berlandaskan kemudahan dan keterjangkauan responden yang terdapat di berbagai daerah di Lampung.

Populasi dalam penelitian ini adalah guru SD di Lampung yang menerapkan Kurikulum Merdeka, sekaligus memiliki peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) di kelas. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti tidak mengkhususkan pada sekolah yang mendeklarasikan sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusi saja, tetapi juga sekolah reguler yang menerima dan memberikan layanan pendidikan bagi PDBK. Selanjutnya, sampel dalam penelitian ini dipilih secara *random sampling*, dengan kriteria sudah menerapkan Kurikulum Merdeka dan memiliki PDBK di kelas. Sehingga bagi guru yang belum menerapkan Kurikulum Merdeka atau tidak memiliki PDBK di kelas, tidak masuk ke dalam kriteria responden.

Tabel 1. Kisi-Kisi Instrumen

No	Aspek
1.	Latar belakang responden
2.	Pemahaman dan pengalaman guru terkait Kurikulum Merdeka
3.	Kendala dalam perencanaan dan adaptasi kurikulum
4.	Kendala dalam pelaksanaan pembelajaran
5.	Kendala dalam evaluasi dan refleksi pembelajaran
6.	Kendala dalam kolaborasi guru kelas/bidang studi dan GPK
7.	Dukungan pihak sekolah dan orang tua
8.	Eksplorasi kebutuhan guru

Penyebaran *link* survei dilakukan selama sepuluh hari, yakni 7 sampai 17 Agustus 2023 melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Kuesioner terdiri dari 8 Aspek yang dapat dilihat pada

Tabel 1. Instrumen kuesioner telah divalidasi oleh akademisi, guru SLB, dan guru di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi sebelum disebarakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan angket kuesioner secara daring dari 7-17 Agustus 2023. Kriteria responden dalam penelitian ini adalah guru SD, menerapkan Kurikulum Merdeka, dan memiliki peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) di kelas. Terdapat 32 guru yang mengisi angket yang disebarakan melalui media sosial dan memenuhi kriteria responden dalam penelitian ini. Responden guru yang mengisi berasal dari 9 kabupaten dan 23 SD di Lampung. Sebanyak 27 (84%) responden menerapkan Kurikulum Merdeka di tahun 2023, sedangkan sisanya 5 (16%) di tahun 2023. Informasi lebih detail mengenai latar belakang responden guru dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Latar Belakang Responden Guru

Indikator	Jawaban responden	n	%
Mengajar di kelas	1	8	35%
	2	5	22%
	3	1	4%
	4	4	17%
	5	4	17%
	6	5	22%
	Guru agama	1	4%
	Guru lainnya (olahraga, seni, dll)	3	13%
Jumlah PDBK di kelas	1	13	57%
	2	7	30%
	3	7	30%
	4	3	13%
	lebih dari 5	1	4%

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa responden terbanyak dalam penelitian ini mengajar di kelas 1, yakni sebesar 35%. Selanjutnya, 57% guru memiliki jumlah PDBK sebanyak 1 orang di kelas. Hanya ada 1 responden yang memiliki jumlah PDBK lebih dari 5 di kelas. Selanjutnya, jenis-jenis kebutuhan khusus yang terdapat di kelas responden dapat dilihat pada Gambar 1 berikut. Berdasarkan Gambar 1 dapat diketahui bahwa jenis kebutuhan khusus terbanyak di kelas responden yakni lamban belajar (78%), disusul Gangguan pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas/ADHD (25%), dan kesulitan belajar spesifik sebesar 21,9%. Banyaknya anak lamban belajar yang ada di kelas responden selaras dengan temuan yang menyatakan bahwa peserta didik lamban belajar dengan segala permasalahannya banyak ditemukan di SD (Mumpuniarti, Sari Rudiwati, Sukinah, 2012). Hasil ini juga sejalan dengan teori yang menyebutkan bahwa prevalensi sebesar 5% dari populasi kelas untuk anak ADHD, dan 5-15% untuk kesulitan belajar spesifik.(APA, 2012). Hasil ini pun sejalan dengan hasil penelitian di sebuah sekolah di mana 5,3% dari keseluruhan peserta didik mengalami ADHD (Sasono, 2018).



Gambar 1. Jenis Kebutuhan Khusus di Kelas Responden

Pemahaman dan Pengalaman terkait Kurikulum Merdeka bagi PDBK di sekolah dasar

Aspek pertama dalam penelitian ini berkenaan dengan pemahaman dan pengalaman guru dalam belajar maupun menerapkan Kurikulum Merdeka, khususnya bagi PDBK di sekolah reguler. Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa 100% guru mengetahui mengenai Kurikulum Merdeka itu sendiri. Diketahui pula bahwa 44% guru telah mempelajari mengenai implementasi Kurikulum Merdeka bagi PDBK di sekolah. Terdapat keragaman sumber belajar guru. Namun, 80% guru mempelajari dari internet dan sosial media, disusul 60% dari Platform Akun Belajar dari pemerintah.

Kegiatan yang pernah diikuti guru dalam mempelajari Kurikulum Merdeka bagi PDBK beragam. Namun, ditemukan bahwa 38% guru belum pernah mengikuti kegiatan yang secara khusus mempelajari implementasi Kurikulum Merdeka bagi PDBK di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Hal ini selaras dengan temuan 44% responden belum pernah mengikuti pelatihan/workshop/seminar mengenai tema tersebut. Padahal, kegiatan pelatihan secara langsung terhadap guru diketahui dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman guru dalam melaksanakan Kurikulum Merdeka bagi PDBK di kelas (Rafikayati, Badiah, Alifah, & Salsabila, 2022). Lebih detail mengenai pemahaman dan pengalaman guru dapat dilihat di Tabel 3.

Tabel 3. Pemahaman Dan Pengalaman Guru Terkait Kurikulum Merdeka bagi PDBK di Sekolah Dasar

Indikator	Jawaban	n	%
Mengetahui tentang Kurikulum Merdeka	Ya	32	100%
	Tidak	-	-
Pernah/tidak mempelajari mengenai Kurikulum Merdeka bagi PDBK di sekolah reguler/sekolah penyelenggara inklusi	Ya	14	44%
	Tidak	18	56%
sumber Anda mempelajari Kurikulum Merdeka bagi PDBK (responden dapat menjawab lebih dari 1)	Platform Akun Belajar	19	60%
	Buku	5	16%
	Internet dan sosial media	26	81%
	Sosialisasi	9	28%
	Pelatihan	9	25%
Kegiatan yang pernah diikuti dalam mempelajari Kurikulum Merdeka bagi PDBK responden dapat menjawab lebih dari 1)	Sosialisasi dari pemerintah	4	13%
	Webinar	8	25%
	Seminar	4	13%
	Pelatihan/Bimbingan Teknis	6	19%
	Workshop	8	25%
	In House Training	5	16%
Jumlah keikutsertaan dalam kegiatan seminar/pelatihan/workshop mengenai Kurikulum	Belum pernah ada kegiatan	12	38%
	Belum pernah	14	44%
	1 kali	14	44%

Merdeka bagi PDBK	2 kali	2	6%
	3 kali atau lebih	2	6%
Mengetahui adanya Capaian Pembelajaran khusus bagi PDBK dengan hambatan intelektual dalam kurikulum Merdeka	Ya	14	44%
	Tidak	6	19%
	Ragu-ragu	12	38%
Memahami pembelajaran berdiferensiasi	Ya	17	53%
	Tidak	6	19%
	Ragu-ragu	9	28%
kerjasama antara sekolah dengan Sekolah Luar Biasa	Ada	5	16%
	Belum ada	27	84%

Kurikulum Merdeka memiliki aturan mengenai Capaian Pembelajaran Khusus bagi PDBK dengan hambatan intelektual yang tertuang dalam. Capaian Pembelajaran bagi peserta didik dengan hambatan intelektual dapat disesuaikan dengan usia mental dan menggunakan Capaian Pembelajaran untuk Pendidikan Khusus (Maryanti, Febiana, & Aini, 2022). Namun, ternyata hanya 44% responden yang mengetahui hal ini, sedangkan 38% merasa ragu-ragu dan 19% merasa tidak tahu. Padahal, terdapat temuan 78% peserta didik lamban belajar dan 15,6% peserta didik dengan hambatan intelektual yang berada di kelas responden. Sehingga cukup disayangkan jika masih banyak responden yang belum mengetahui mengenai Capaian pembelajaran khusus bagi PDBK dengan hambatan intelektual

Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu hal yang menjadi kebaruan dalam Kurikulum Merdeka. Saat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat memberikan layanan pendidikan sesuai dengan gaya belajar, potensi, kebutuhan, dan permasalahan peserta didik. Guru dapat mendiferensiasikan konten, proses, produk akhir belajar, dan lingkungan yang disesuaikan dengan kesiapan belajar, profil peserta didik, serta minat dan gaya belajar (Tomlinson, 2014). Guru memiliki peran penting dalam terlaksananya pembelajaran berdiferensiasi (Faiz, Pratama, & Kurniawaty, 2022). Mengenai pembelajaran berdiferensiasi, 53% responden guru mengaku memahami, 28% masih ragu-ragu, dan 19% tidak memahami. Hal ini mengindikasikan bahwa guru SD di Lampung perlu mendapatkan pelatihan maupun kegiatan yang membantu mereka dalam mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu, kerjasama antara sekolah dengan SLB sangatlah penting dalam membangun kolaborasi yang inklusif. Namun, ternyata hanya 5 responden guru yang menyatakan sudah ada kerjasama dengan SLB terdekat.



Gambar 2. Keterlibatan PDBK Saat Pembelajaran.

Ketika ada PDBK di kelas, tentunya diharapkan adanya keterlibatan dan keaktifan PDBK tersebut di kelas. Keaktifan PDBK di kelas tentunya diharapkan dapat meningkatkan partisipasi belajar sekaligus

penerimaan dari teman sekelas. Hasil penelitian menemukan bahwa 53% responden merasa bahwa keterlibatan PDBK berada di skor 3 atau cukup. Teori. Selanjutnya, Gambar 3 menampilkan kesulitan yang dialami oleh guru dalam proses belajar dan mengajar di kelas. Kesulitan terbesar yang dialami guru terkait pengelolaan perilaku (65,6%), memberi layanan pendidikan di kelas (59%), dan menyusun rancangan rencana pembelajaran (56.3%). Selain kesulitan, terdapat 1 responden yang menjawab tidak ada kesulitan dalam mengajar PDBK di kelas.



Gambar 3. Kesulitan Mengajar PDBK di SD Reguler

Kendala dalam perencanaan, dan adaptasi kurikulum

Perencanaan pembelajaran dan adaptasi kurikulum menjadi hal yang penting, terlebih jika terdapat PDBK di kelas. Berdasarkan hasil penelitian, pada pertanyaan, ”Apakah guru melakukan modifikasi modul ajar bagi PDBK?” diketahui bahwa 1 (3%) responden menjawab “Selalu”, 16 (50%) mengaku “jarang”, 7 (22%) memilih “sering” dan 8 (25%) mengaku tidak pernah melakukan modifikasi modul ajar. Ketika memiliki PDBK di kelas, guru dapat mengembangkan universal design learning, atau desain pembelajaran yang secara keseluruhan telah mengakomodasi berbagai keragaman peserta didik. Berdasarkan Tabel 4, diketahui bahwa sudah ada 16% responden yang menerapkan desain ini. Terdapat pula 28% guru yang sudah membuat modul ajar dengan tambahan dokumen modifikasi bagi PDBK. Namun, masih terdapat 56% guru yang belum melakukan modifikasi kurikulum bagi PDBK saat membuat modul ajar.

Tabel 4. Bentuk Perencanaan yang Dibuak Guru

Perencanaan yang biasa dibuat guru	n	%
1 modul ajar untuk seluruh kelas tanpa modifikasi	18	56%
1 modul ajar untuk seluruh kelas yang sudah mengakomodasi keragaman PDBK (<i>universal design learning</i>)	5	16%
1 modul ajar untuk seluruh kelas, dan tambahan dokumen modifikasi untuk PDBK	9	28%

Tabel 5 menyajikan jawaban guru terkait kendala dalam perencanaan dan adaptasi kurikulum bagi PDBK di kelas. Sebanyak 31.25% guru menyetujui dan 31.25% sangat setuju dengan pernyataan mengenai sulitnya memahami apa dan bagaimana asesmen PDBK di sekolah mereka. Hal ini juga sejalan dengan perencanaan di mana 34.38% setuju dan 21.88% merasa bingung dalam merencanakan pembelajaran menggunakan Kurikulum Merdeka di kelas. Merujuk Tabel 5 juga diketahui bahwa sebagian besar guru masih belum memahami adaptasi pembelajaran bagi PDBK, kesulitan merencanakan pembelajaran dengan berbagai fase kemampuan peserta didik, dan terkendala dalam memilih metode dan media pembelajaran. Berdasarkan

total keseluruhan didapat bahwa 37% menjawab “Setuju” dan 20% “Sangat Setuju” pada pernyataan terkait kesulitan dalam merencanakan dan mengadaptasi kurikulum bagi PDBK di kelas.

Tabel 5. Kendala Dalam Perencanaan dan Adaptasi Kurikulum

Pernyataan	STS		TS		S		SS	
	n	%	n	%	n	%	n	%
1. Saya merasa kesulitan dalam memahami asesmen PDBK di sekolah	4	12.5%	8	25%	10	31.25%	10	31.25%
2. Saya bingung dalam merencanakan pembelajaran menggunakan Kurikulum Merdeka di kelas inklusi	3	9.4%	11	34%	11	34.38%	7	21.88%
3. Saya merasa belum memahami adaptasi pembelajaran bagi PDBK di kelas	3	9.4%	10	31%	14	43.75%	5	15.63%
4. saya kesulitan dalam merencanakan pembelajaran akibat keberagaman fase peserta didik di kelas	4	12.5%	12	38%	10	31.25%	6	18.75%
5. saya terkendala dalam memilih metode dan media pembelajaran yang mampu mengakomodasi keberagaman fase peserta didik di kelas	3	9.4%	12	38%	15	46.88%	4	12.50%
Jumlah	17	10%	53	33%	60	37%	32	20%

Kendala dalam pelaksanaan pembelajaran

Pernyataan 6 hingga 11 memuat kendala guru dalam pelaksanaan pembelajaran bagi PDBK di kelas. Pernyataan 6 mengindikasikan bahwa sebagian besar guru telah melakukan modifikasi kegiatan pembelajaran bagi PDBK. Jawaban atas pernyataan 7 menunjukkan bahwa separuh lebih guru tidak merasa kesulitan dalam mengimplementasikan pembelajaran yang dibuat. Berdasarkan jumlah keseluruhan, didapat 16% guru menyebut “Sangat Tidak Setuju” dan 48% “Tidak Setuju” dengan pernyataan-pernyataan terkait kesulitan dalam pelaksanaan pembelajaran. Hal ini mengindikasikan bahwa Sebagian besar guru tidak mengalami kesulitan berarti dalam implementasi Kurikulum Merdeka bagi PDBK di kelas.

Tabel 6. Kendala Dalam Pelaksanaan Pembelajaran

Pernyataan	STS		TS		S		SS	
	n	%	n	%	n	%	n	%
6. saya sering tidak melakukan modifikasi kegiatan pembelajaran bagi PDBK	7	22%	14	44%	8	25%	3	9%
7. Saya kesulitan dalam mengimplementasi pembelajaran sesuai dengan rencana yang sudah dibuat	5	16%	16	50%	9	28%	2	6%
8. terkadang pelaksanaan pembelajaran kurang sesuai dengan apa yang sudah direncanakan	3	9%	13	41%	12	38%	4	13%
9. saya kesulitan dalam mengelola kelas inklusi	3	9%	16	50%	11	34%	2	6%
10. Metode pembelajaran yang saya pilih seringkali kurang cocok dengan keadaan peserta didik	6	19%	15	47%	10	31%	1	3%
11. media pembelajaran yang saya pilih seringkali kurang menunjang materi pembelajaran	6	19%	18	56%	7	22%	1	3%
jumlah	30	16%	92	48%	57	30%	13	7%

Kendala dalam evaluasi pembelajaran

Kendati sebagian guru tidak mengalami hambatan dalam pelaksanaan, tetapi guru mengalami kendala dalam merencanakan dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Hal ini terlihat pada pernyataan 12 hingga 17 yang memiliki persentase jawaban “Setuju di rentang 38-47% pada pernyataan yang menyatakan adanya

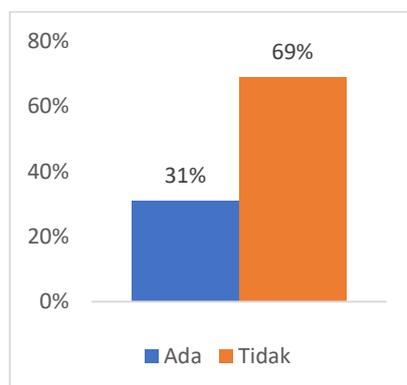
kendala maupun kesulitan. Permasalahan terbesar guru berdasarkan total jawaban “setuju” dan “sangat setuju” yakni pada mengembangkan instrumen penilaian (66%), merancang evaluasi (60%), dan melakukan diferensiasi penilaian (56%).

Tabel 7. Kendala Dalam Evaluasi Pembelajaran

Pernyataan	STS		TS		S		SS	
	n	%	n	%	n	%	n	%
12. Saya merasa kesulitan dalam mengembangkan instrumen penilaian pembelajaran bagi PDBK sesuai dengan kurikulum merdeka di sekolah inklusi	3	9%	8	25%	14	44%	7	22%
13. Saya kesulitan dalam memilih teknik evaluasi pembelajaran di tengah keberagaman fase peserta didik	4	13%	12	38%	15	47%	1	3%
14. saya sering kali tidak melakukan modifikasi evaluasi pembelajaran bagi PDBK	6	19%	11	34%	12	38%	3	9%
15. Saya kesulitan dalam merancang evaluasi pembelajaran bagi PDBK di kelas	2	6%	11	34%	14	44%	5	16%
16. saya merasa waktu yang saya miliki tidak cukup untuk merancang evaluasi pembelajaran dengan keragaman peserta didik di kelas	2	6%	12	38%	14	44%	4	13%
17. saya terkendala dalam merancang dan melakukan diferensiasi cara penilaian jumlah	1	3%	13	41%	15	47%	3	9%
	18	9%	67	35%	84	44%	23	12%

Kendala dalam kolaborasi guru kelas/bidang studi dan GPK

Kolaborasi antara guru kelas atau mata pelajaran dan Guru Pembimbing Khusus (GPK) menjadi pilar penting dalam terlaksananya implementasi pendidikan inklusif di sekolah reguler. Namun, belum semua sekolah memiliki GPK. Berdasarkan jawaban responden, 22 (69%) tidak memiliki GPK dan 10 (31%) menyatakan adanya GPK di sekolah. Ketiadaan GPK di sekolah reguler seringkali menimbulkan permasalahan di kelas. Melihat jumlah dan jenis kebutuhan khusus yang beragam di kelas responden, pemenuhan GPK di sekolah reguler memang sangat diperlukan dalam upaya mengoptimalkan potensi PDBK di sekolah (Rizqianti, Ningsih, Ediyanto, & Sunandar, 2022).



Gambar 4. Ada/Tidak Adanya GPK di Sekolah

Tabel 8 memaparkan hasil jawaban terkait kolaborasi dari 10 responden yang memiliki GPK di kelas. Kolaborasi antara guru kelas dan GPK seringkali menjadi kendala dalam memberikan layanan bagi PDBK di kelas (Rahmaniar, 2016). Hasil ini mengindikasikan bahwa guru kelas dan GPK memiliki hubungan dan

kolaborasi yang baik dan mampu mengatasi permasalahan terkait komunikasi dan perbedaan pendapat yang mungkin kerap terjadi. Kendati demikian, masih terdapat 20% guru yang masih merasa kerjasama yang dimiliki belum maksimal dan merasa kekurangan waktu dalam merencanakan pembelajaran bersama.

Tabel 8. Kendala Dalam Kolaborasi Guru Kelas/Bidang Studi dan GPK

Pernyataan	STS		TS		S		SS	
	n	%	n	%	n	%	n	%
18. Guru kelas kesulitan dalam berkomunikasi dengan GPK, atau sebaliknya.	5	50%	5	50%				
19. saya bingung dengan pembagian tugas antara guru kelas dan GPK di kelas inklusi	4	40%	6	60%				
20. kerja sama antara guru kelas dan GPK dirasa belum maksimal	3	30%	5	50%	2	20%		
21. guru kelas dan GPK kekurangan waktu untuk merencanakan pembelajaran	4	40%	4	40%	1	10%	1	10%
22. guru kelas dan GPK sering kali memiliki perbedaan pendapat yang terkadang menghambat pembelajaran	4	40%	6	60%				
Jumlah	20	38%	26	52%	3	6%	1	2%

Dukungan pihak sekolah dan orang tua

Guru memanglah pelaksana pendidikan di kelas. Namun, tanpa dukungan sekolah dan orang tua, guru akan kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran yang telah direncanakan. Temuan yang menarik pada Tabel 9, di mana total persetujuan sebesar 50% dan 50% total ketidaksetujuan pada pernyataan mengenai inklusi barulah sekadar slogan di sekolah. Namun, terkait dukungan sekolah, 69% ketidaksetujuan pada pernyataan 24 yang menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah telah mendukung guru dalam implementasi PDBK. Meskipun begitu, total 97% guru menyetujui pernyataan terkait keinginan agar sekolah dapat memiliki sarana dan prasarana yang aksesibel bagi PDBK. Hal ini didukung dengan total persetujuan sebesar 51% pada pernyataan bahwa guru kesulitan dalam mengeksplorasi kegiatan pembelajaran akibat keadaan sekolah. Namun, terdapat total 49% responden yang menyatakan ketidaksetujuan dengan pernyataan tersebut.

Mengenai sumber referensi, 66% menyetujui bahwa referensi dalam implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah inklusi masih terbatas. Hal ini dapat disebabkan kurangnya referensi yang tersedia di lapangan. Namun, dapat juga dipengaruhi kurang tersosialisasikannya referensi terutama yang dibuat oleh pemerintah terkait implementasi pendidikan inklusi di sekolah reguler dengan Kurikulum Merdeka. Selain itu, sekolah juga berperan dalam menyediakan dan membagikan berbagai referensi baik buku, video, dan berbagai sumber yang dapat membantu guru dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka bagi PDBK.

Orang tua memiliki peran penting dalam mengoptimalkan potensi anaknya di sekolah. Peran dan kolaborasi orang tua sangat penting dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif yang bermakna bagi peserta didik (Wardani & Dwiningrum, 2021). Hasil penelitian menemukan bahwa 87% guru menyatakan persetujuan mengenai harapan mereka agar orang tua lebih kooperatif. Sehingga baik guru maupun orang tua diharapkan dapat meningkatkan komunikasi, kolaborasi, dan dukungan demi perkembangan peserta didik yang optimal.

Tabel 9. Dukungan Pihak Sekolah dan Orang Tua

Pernyataan	STS		TS		S		SS	
	n	%	n	%	n	%	n	%
23. saya merasa inklusi baru sekadar slogan di sekolah ini	6	19%	10	31%	14	44%	2	6%
24. Saya merasa pihak sekolah kurang mendukung guru dalam implementasi kurikulum merdeka bagi PDBK	9	28%	13	41%	6	19%	4	13%
25. Saya ingin sekolah memiliki sarana dan prasarana yang aksesibel bagi PDBK		0%	1	3%	9	28%	22	69%
26. Keadaan sekolah saat ini menyulitkan saya dalam mengeksplorasi kegiatan pembelajaran bagi PDBK	5	16%	11	34%	12	38%	4	13%
27. Saya merasa ketersediaan buku maupun referensi yang menunjang guru dalam implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah inklusi sangat terbatas	4	13%	7	22%	9	28%	12	38%
28. Saya merasa kolaborasi dengan sesama guru belum maksimal	2	6%	8	25%	12	38%	10	31%
29. saya mengharapkan orang tua dapat lebih kooperatif dalam bekerja sama dengan guru	1	3%	3	9%	9	28%	19	59%
jumlah	27	12%	53	24%	71	32%	73	33%

Secara keseluruhan, dapat diketahui bahwa guru menjumpai berbagai kendala dalam implementasi Kurikulum Merdeka bagi PDBK. Namun, kendala terbesar guru dalam implementasi Kurikulum Merdeka bagi PDBK terdapat pada aspek perencanaan pembelajaran dan mengembangkan evaluasi pembelajaran. Meskipun terdapat kendala, tetapi pada aspek pelaksanaan pembelajaran, sebagian besar guru tidak mengalami kesulitan berarti. Hal ini pun didukung dengan jawaban guru pada aspek dukungan sekolah yang menyatakan guru mengharapkan peningkatan sarana dan prasarana yang aksesibel dan membantu dalam mengembangkan pembelajaran di kelas. Temuan lain, hanya 31% responden guru yang memiliki GPK di sekolah dan keseluruhannya menyatakan telah melakukan kolaborasi dengan baik dengan GPK.

Eksplorasi kebutuhan guru

Terdapat 10 jawaban mengenai kebutuhan yang dapat dipilih lebih dari satu oleh responden guru. Selaras dengan jawaban guru pada bagian dukungan, 94% guru menyatakan mereka membutuhkan orang tua yang lebih terbuka, 84% membutuhkan dukungan sekolah dan dukungan sarana dan prasarana. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menemukan kesiapan sarana dan prasarana merupakan hal penting dalam kesiapan implementasi Kurikulum Merdeka di SD (Oktaviani & Ramayanti, 2023). Serta berkisar 63-66% guru membutuhkan pelatihan-pelatihan yang membantu mereka dalam memahami PDBK, merancang pembelajaran, melakukan asesmen, dan juga merancang adaptasi kurikulum. Selain itu, terdapat 75% guru yang membutuhkan aplikasi yang membantu mereka dalam mengidentifikasi PDBK saat penerimaan peserta didik baru. Selengkapnya, Tabel 10 memuat detail persentase dari tiap kebutuhan.

Tabel 10. Kebutuhan Guru Sekolah Dasar Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Bagi PDBK

Kebutuhan	n	%
1. Orang tua lebih terbuka dan berkolaborasi	30	94%
2. Dukungan sarana dan prasarana	27	84%
3. Dukungan sekolah	27	84%
4. Kebijakan yang lebih jelas terkait tugas guru kelas dan GPK di kelas inklusi	21	66%
5. Pelatihan dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi	20	63%
6. Pelatihan dalam memahami dan menangani PDBK di sekolah	21	66%

7. Pelatihan pembelajaran yang universal untuk diterapkan di kelas	21	66%
8. Pelatihan khusus dalam merancang adaptasi kurikulum yang sesuai dengan PDBK	21	66%
9. Panduan yang bisa membantu dalam melakukan asesmen PDBK	20	63%
10. Saya membutuhkan aplikasi yang dapat membantu guru dalam mengidentifikasi PDBK baru saat PPDB	24	75%

Temuan kebutuhan ini sejalan dengan permasalahan dan pengetahuan dan pengalaman yang guru alami. Penelitian menemukan bahwa guru memiliki kesulitan dalam melakukan asesmen, perencanaan pembelajaran dan evaluasi. Hal ini lah yang menjadi jawaban-jawaban guru pada pertanyaan mengenai kebutuhan. Temuan di atas yang menampilkan masih banyak guru yang belum mendapatkan pelatihan-pelatihan, sehingga sebagian besar guru memilih perlunya pelatihan terkait implementasi Kurikulum Merdeka bagi PDBK di sekolah reguler. Khususnya di Provinsi Lampung, hal ini dapat menjadi perhatian para pemerintah, akademisi maupun organisasi terkait lainnya dalam memberikan bantuan kepada guru sesuai dengan kebutuhan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menemukan bahwa masih terdapat guru SD di Lampung yang belum memahami secara penuh mengenai implementasi Kurikulum Merdeka bagi PDBK. Hal ini disebabkan kurangnya keikutsertaan guru dalam hal aktivitas seperti pelatihan maupun sosialisasi dalam menerapkan Kurikulum Merdeka bagi PDBK. Kurangnya pelatihan ini berdampak pada guru SD di Lampung yang masih memiliki kesulitan dalam merancang pembelajaran dan melakukan adaptasi kurikulum serta kesulitan dalam merancang dan melakukan evaluasi pembelajaran. Penelitian ini merumuskan kebutuhan guru, di mana juga diurutkan guru membutuhkan orang tua yang lebih berkolaborasi (94%), dukungan sarana dan prasarana (84%), dukungan sekolah (84%), aplikasi dalam mengidentifikasi PDBK saat PPDB (75%) serta di rentang 63-66% terkait kebutuhan berbagai pelatihan dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi, merancang pembelajaran desain universal, melakukan adaptasi kurikulum, dan memahami serta menangani PDBK di kelas. 63% guru juga mengharapkan adanya panduan asesmen bagi PDBK di sekolah umum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia atas bantuan hibah dalam penelitian ini, serta kepada seluruh guru Sekolah Dasar di Lampung yang bersedia menjadi responden.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, I. (2019). Permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi di sdn se kecamatan soko kabupaten tuban. *ELSE (Elementary School Education Journal): Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Sekolah Dasar*, 3(2), 17–26.
- Ananda, A., & Hudaidah, H. (2021). PERKEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN DI INDONESIA DARI MASA KE MASA. *SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Kajian Sejarah*, 3(2 SE-Articles). <https://doi.org/https://doi.org/10.31540/sindang.v3i2.1192>
- Angga, A., Suryana, C., Nurwahidah, I., Hernawan, A. H., & Prihantini, P. (2022). Komparasi Implementasi Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar Kabupaten Garut. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 5877–5889. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3149>

- 2940 *Kendala Dan Kebutuhan Guru Sekolah Dasar dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Lampung – Heni Herlina, Ossy Firstanti Wardany, Yulvia Sani, Revita Zalsyabila Maharani*
DOI: <https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i5.6086>
- APA. (2012). *DIAGNOSTIC AND STATISTICAL MANUAL OF MENTAL DISORDERS 5TH EDITION (DSM-5)*. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.
- Faiz, A., Pratama, A., & Kurniawaty, I. (2022). Pembelajaran Berdiferensiasi dalam Program Guru Penggerak pada Modul 2.1. *Jurnal Basicedu*, 6(2), 2846–2853. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i2.2504>
- Haslina, Yusrizal, & Usman, N. (2017). Kinerja Guru Dalam Implementasi Kurikulum 2013 Pada Sma Negeri 5 Lhokseumawe. *Jurnal Magister Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 5(4), 211–217.
- Hurit, A. A., & Harmawati, Di. (2019). Analisis Kesiapan Guru dalam Mengimplementasikan Kurikulum 2013 di SD Inpres Gudang Arang Merauke. *Musamus Journal of Primary Education*, 1(2), 116–123.
- Ihsan, M. (2022). Kesiapan Guru terhadap Implementasi Kurikulum. *Seri Publikasi Pembelajaran*, 1(1), 37–46.
- Isa, Asrori, M., & Muharini, R. (2022). Peran Kepala Sekolah dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar Isa1? *Basicedu*, 6(6), 9947–9957. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i3.2596>
- Jamjegah, Tomo, D., Erlina, & Hartoyo, A. (2022). Analisis Kesiapan Guru dalam Melaksanakan Pembelajaran Kurikulum Merdeka di SDN 47 Penanjung Sekadau. *Jurnal Pendidikan Dasar Perkhasa*, 8(2), 119–127.
- Lestari, N. A. P. (2023). Analysis of 2013 curriculum problems so it is changed into a merdeka curriculum. *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, 8(2), 263–274. <https://doi.org/10.29407/jpdn.v8i2.19229>
- Maryanti, R., Febiana, & Aini, S. N. (2022). *Buku Panduan Guru Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik dengan Hambatan Intelektual untuk SDLB, SMPLB, dan SMALB*. Jakarta: Pusat Perbukuan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Retrieved from <https://buku.kemdikbud.go.id>
- Mumpuniarti, Sari Rudiwati, Sukinah, E. S. C. (2012). Kebutuhan belajar siswa lamban belajar. *Education and Information*, 1–15.
- Muzdalifa, E. (2022). Learning Loss Sebagai Dampak Pembelajaran Online Saat Kembali Tatap Muka Pasca Pandemi Covid 19. *GUAU: Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam*, 2(1), 2022.
- Nurzen, M. (2022). Teacher Readiness in Implementing the Merdeka Curriculum in Kerinci Regency. *Edunesia: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 3(3), 313–325.
- Oktaviani, S., & Ramayanti, F. (2023). Analisis Kesiapan Sekolah dalam Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 7(3), 1454–1460.
- Rafikayati, A., Badiah, L. I., Alifah, F. D., & Salsabila, I. B. (2022). Pelatihan Implementasi Kurikulum Merdeka Di Sekolah Inklusi. *Kanigara*, 2(2), 478–485. Retrieved from <https://sinta.unipasby.ac.id/index.php/kanigara/article/view/6274>
- Rahmaniar, F. A. (2016). Tugas guru pendamping khusus dalam memberikan pelayanan pendidikan siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusif SD Negeri Giwangan Yogyakarta. *Jurnal Widia Ortodidaktika*, 5(12), 1252.
- Rizqianti, N. A., Ningsih, P. K., Ediyanto, E., & Sunandar, A. (2022). Implementasi Tugas Guru Pembimbing Khusus Serta Kendala sebagai Tenaga Pendidik Profesional di Sekolah Inklusi Kota Surabaya. *Jurnal Pendidikan Kebutuhan Khusus*, 6(1), 67–75. <https://doi.org/10.24036/jpkk.v6i1.609>
- Romadhon, M., & Supena, A. (2021). Penanganan Siswa Learning Disabilities di Sekolah Dasar Inklusi. *Jurnal Basicedu*, 5(3), 1471–1478.
- Rouf, A., & Lufita, R. (2013). Peranan Guru dalam Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Jombang. *Sumbula*, 3(2), 904–926.
- Sasono, C. K. S. (2018). *Hubungan Antara Temperamen Anak dengan Faktor Risiko Attention*

- 2941 *Kendala Dan Kebutuhan Guru Sekolah Dasar dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Lampung – Heni Herlina, Ossy Firstanti Wardany, Yulvia Sani, Revita Zalsyabila Maharani*
DOI: <https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i5.6086>

Deficit/Hyperactivity Disorder pada Anak Sekolah Dasar. Universitas Airlangga.

- Shadri, R., Hermita, N., Deswarni, D., Purnamasari, A. S., Julia Lingga, L., Wijaya, H., ... Guru Penggerak Provinsi Riau, B. (2023). Assessment in the Merdeka Curriculum: How Are the Teachers' Perspectives on It? *Penilaian Dalam Kurikulum Merdeka: Bagaimana Perspektif Guru Dalam Pelaksanaannya? Jurnal PAJAR (Pendidikan Dan Pengajaran)*, 7(1), 202–209.
- Sumanti, V., Firman, F., & Ahmad, R. (2022). Peran Guru dalam Kebijakan Kurikulum Merdeka di Sekolah. *Keguruan: Jurnal Penelitian, Pemikiran Dan Pengabdian*, 10(2), 49–52.
- Tomlinson, C. A. (2014). *The Differentiated Classroom*. Alexandria, VA: ASCD. Retrieved from file:///Articles/2004/Unknown/2004-7.pdf
- Wantiana, I., & Mellisa. (2023). Kendala Guru dalam Penerapan Kurikulum Merdeka. *Jurnal Basicedu*, 7(3), 1461–1465.
- Wardani, K., & Dwiningrum, S. I. (2021). Studi Kasus: Peran Orang Tua dalam Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Seruma. *Wacana Akademika: Majalah Ilmiah Kependidikan*, 5(1), 69–75.
- Widiastuti, R., Sulistiani, P., & Kurniawan, V. R. B. (2017). Analisis Beban Kerja Mental Guru Untuk Perbaikan Sistem Pembelajaran Sekolah Luar Biasa (SLB) Kategori B (Studi Kasus: SLB-B Karnnamanohara Yogyakarta). *IEJST (Industrial Engineering Journal of The University If Sarjanawiyata Tamansiswa)*, 1(1), 17–26.